
ANALISIS PEMANFAATAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN PADA APBD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MANUSIA SEKTOR PENDIDIKAN TAHUN 2011-2020

Oleh:

Ridho Dwianto,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Email: ridho.dwianto1910@grand.unri.ac.id

Syapsan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Hendro Ekwarso

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of allocating the education expenditure budget in the Kuantan Singingi District Budget on improving the quality of human development in the education sector, to find out what factors cause the low growth of the quality of human development in the Education sector in Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques: documentation. The Data Analysis method uses multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously education expenditure consisting of employee expenditure, goods and services expenditure and capital expenditure had a significant effect on the quality of human development in the education sector. Partially only spending on goods and services has a significant effect on the quality of human development in the education sector. Factors that cause the low growth of the quality of human development in the education sector are due to the disproportionate distribution of the education expenditure budget, the small expenditure on goods and services while what has a significant effect on the growth of the quality of human development in the education sector is precisely only spending on goods and services. Efforts made to improve the quality of human development in the education sector in Kuantan Singingi Regency include increasing the education expenditure budget in the regional budget every year, allocating proportional education spending and further increasing the expenditure on goods and services because it affects improving the quality of human development in the education sector.

Keyword :

Employee Expenditure, Goods and Services Expenditure, Capital Expenditure, Quality of Human Development in the Education Sector

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tiga tantangan di dalam dunia Pendidikan hingga saat ini. Adapun tiga tantangan tersebut yaitu pendidikan nasional Indonesia diharapkan untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan Pendidikan yang telah dicapai akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini. Tantangan berikutnya, pendidikan nasional diharapkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global dalam menghadapi era

globalisasi. Tantangan ketiga atau terakhir diperlukannya melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional agar dapat terwujudnya suatu pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah, dan peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat sejalan dengan telah diberlakukannya otonomi daerah (Sumardi, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang dalam hal penganggaran anggaran Pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2009 telah mulai dilakukan dan dijalankan oleh pemerintah. Dilakukannya pengalokasian anggaran Pendidikan oleh pemerintah yang cukup besar sehingga mutu Pendidikan di Indonesia semakin meningkat, dapat dijaga dan juga menjadi salah satu jalan program pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh daerah yang dimulai dengan melakukan pemerataan pendidikan di setiap daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Amandemen IV Tahun 2002 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 C Ayat (1) UUD 1945, kemudian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV Tahun 2002, anggaran pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat satu

(1) tentang sistem pendidikan nasional bahwa dana pendidikan selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal penggunaan anggaran Pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, menuntaskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik.

Untuk besaran alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya terjadi fluktuasi atau naik turun pada anggaran pendidikan. Naik turunnya anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti total anggaran APBD yang disahkan setiap tahunnya. Anggaran pendidikan dialokasikan pada anggaran belanja yang berada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kuantan Singingi. Alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja modal. Untuk melihat alokasi anggaran pendidikan dari total APBD Kabupaten Kuantan Singingi serta rata-rata pertumbuhan anggaran pendidikan tahun 2011-2020 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Total Alokasi APBD dan Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Total Anggaran Belanja (APBD)	Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan	Rasio %	Pertumbuhan
2011	962.872.892.180,35	324.888.834.015,00	33,74	
2012	1.058.708.036.946,07	333.535.094.799,91	31,50	2,66
2013	1.364.156.935.134,29	413.992.183.738,49	30,35	24,12
2014	1.570.535.112.520,10	457.702.327.968,60	29,14	10,56
2015	1.585.886.765.414,00	575.777.832.704,00	36,31	25,80
2016	1.413.155.896.952,00	565.908.957.526,00	40,05	-1,71
2017	1.215.076.587.177,73	513.974.340.498,04	42,30	-9,18
2018	1.181.683.178.436,12	489.448.603.360,01	41,42	-4,77
2019	1.188.523.099.480,40	427.877.781.327,59	36,00	-12,58
2020	1.275.056.781.241,57	471.391.719.149,23	36,97	10,17
Total	12.815.655.285.482,60	4.574.497.675.086,87	35,69	5,01

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran untuk fungsi pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi lebih dari 20% yang diamanatkan undang-undang walaupun terjadi

fluktuasi anggaran setiap tahunnya. Pada tabel 1 di atas dapat dilihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara terus menerus. Namun dari

tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 alokasi anggaran pendidikan terjadi penurunan dan pada tahun 2020 alokasi anggaran pendidikan kembali terjadi kenaikan. Rata-rata alokasi anggaran dana pendidikan tahun selama 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 35,69%. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dana pendidikan tahun 2011-2020 atau dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 5,01%.

Dari alokasi anggaran dana pendidikan pada tabel 1 tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi dibagi pengalokasiannya untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2020, belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Lestyowati (2004) belanja pegawai merupakan semua pengeluaran Negara yang dipergunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang dan jasa Menurut Hutabarat (2013), merupakan suatu belanja pengeluaran dalam membelanjakan barang atau

jasa habis pakai yang hanya digunakan di dalam suatu instansi. Kemudian juga menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang atau jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, pihak ketiga atau pihak lainnya dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

Terakhir dari alokasi anggaran dana pendidikan adalah belanja modal. Menurut Halim (2004), Belanja Modal adalah suatu belanja Pemerintah Daerah yang memiliki manfaat melebihi dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Permendagri Nomor 64 Tahun 2020). Pengadaan aset tetap tersebut harus memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Untuk melihat alokasi anggaran pendidikan dan persentase besaran anggaran pendidikan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari tahun 2011-2020 pada APBD Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Besaran Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal pada Alokasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Belanja Pegawai	%	Belanja Barang dan jasa	%	Belanja Modal	%
2011	266.792.463.339,00	82,12	28.633.917.589,00	8,81	29.462.453.087,00	9,07
2012	284.833.341.721,91	85,40	16.965.678.298,00	5,09	31.736.074.780,00	9,52
2013	333.441.752.660,00	80,54	19.089.778.329,49	4,61	61.460.652.749,00	14,85
2014	377.771.246.536,24	82,54	31.399.968.316,46	6,86	48.531.113.115,90	10,60
2015	483.921.865.785,00	84,05	20.935.272.852,00	3,64	70.920.694.067,00	12,32
2016	475.569.936.703,00	84,04	18.680.218.335,00	3,30	71.658.802.488,00	12,66
2017	402.031.826.262,98	78,22	47.608.851.539,00	9,26	64.333.662.696,06	12,52
2018	370.958.833.165,01	75,79	54.779.683.040,00	11,19	63.710.087.155,00	13,02
2019	352.183.699.310,59	82,31	26.645.322.017,00	6,23	49.048.760.000,00	11,46
2020	339.904.794.540,23	72,11	63.984.275.276,00	13,57	67.502.649.333,00	14,32
Jumlah	3.687.409.760.023,96	80,71	328.722.965.591,95	7,26	558.364.949.470,96	12,03

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Dari ketiga alokasi anggaran pendidikan dapat dilihat di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari alokasi anggaran pendidikan pada APBD dalam jangka waktu 10

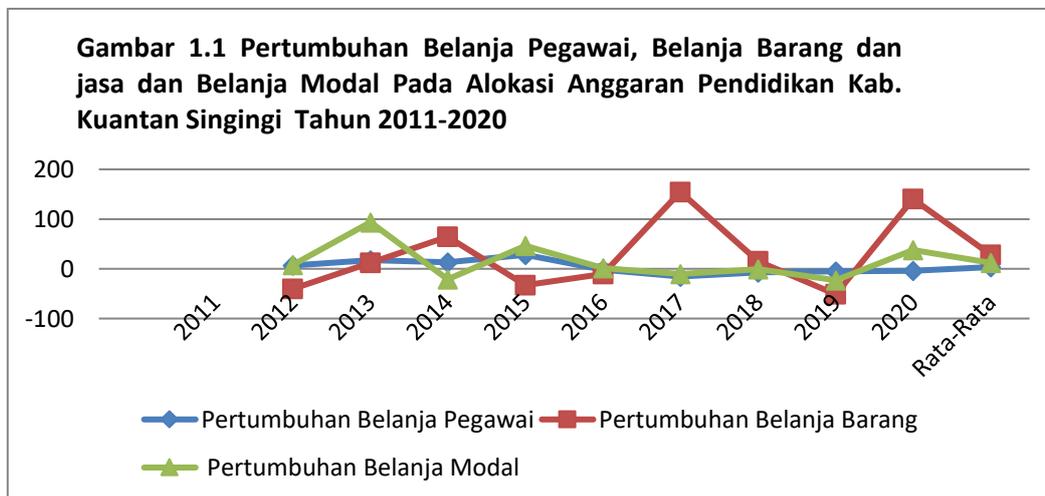
tahun terakhir dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Kemudian dapat dilihat alokasi anggaran pendidikan yang paling tinggi adalah belanja pegawai dengan rata-rata 80,71% dalam 10 tahun terakhir, dan yang terendah alokasi anggaran

pendidikan adalah untuk belanja barang dan jasa dengan rata-rata 7,26% dalam 10 tahun terakhir.

Besarnya persentase belanja bidang pendidikan tidak selalu menggembirakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Apabila kita kaji lebih lanjut, dilihat dari data tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa belanja pendidikan yang besar tersebut lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Padahal untuk meningkatkan mutu

pendidikan, seharusnya proporsi antara belanja pegawai dan belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak boleh terlalu timpang antara ketiga belanja tersebut.

Selanjutnya untuk melihat pertumbuhan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari alokasi anggaran dana Pendidikan tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Gambar 1.1 Grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah belanja barang dengan rata-rata sebesar 27,87% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan pertumbuhan alokasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 154,86%. Kemudian diikuti dengan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja modal adalah sebesar 12,21% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di mana pertumbuhan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 93,66%. Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran terendah adalah belanja pegawai sebesar 3,53% dalam jangka waktu 10 terakhir di mana pertumbuhan alokasi anggaran terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 28,10% .

Selain besaran alokasi anggaran dana pendidikan yang harus memenuhi target 20% sesuai yang diamanatkan undang-undang, pemanfaatan dana pendidikan yang di alokasikan harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penunjang

kegiatan. Dengan pemanfaatan yang efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta penggunaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian untuk melihat besaran realisasi anggaran Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011-2020 dapat dilihat pada tabel 3.

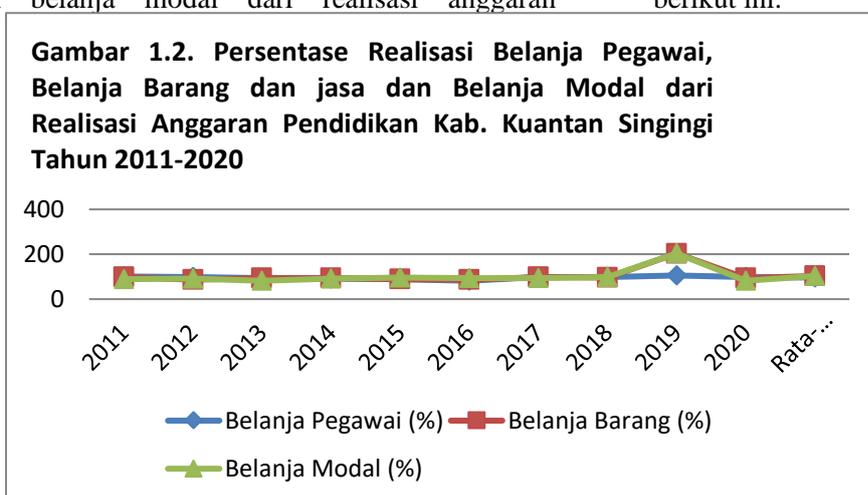
Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat rata-rata realisasi anggaran dana pendidikan dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 96,52%. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan realisasi dana pendidikan dari tahun 2011-2020 atau dalam 10 tahun terakhir adalah sebesar 4,34%. Hal ini berarti pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi telah di manfaatkan dan terealisasi dengan efisien atau maksimal. Rata-rata realisasi dana pendidikan sebesar 96,52% merupakan realisasi belanja dana pendidikan yang terdiri dari realisasi belanja pegawai, realisasi belanja barang serta realisasi belanja modal.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Alokasi Anggaran Dana Pendidikan	Realisasi Anggaran Dana Pendidikan	Rasio %	Pertumbuhan
2011	324.888.834.015,00	324.116.567.083,00	99,76	
2012	333.535.094.799,91	321.543.263.926,00	96,40	-0,79
2013	413.992.183.738,49	382.897.445.475,00	92,49	19,08
2014	457.702.327.968,60	415.453.669.728,00	90,77	8,50
2015	575.777.832.704,00	516.948.910.065,80	89,78	24,43
2016	565.908.957.526,00	472.636.245.093,00	83,52	-8,57
2017	513.974.340.498,04	499.616.622.615,00	97,21	5,71
2018	489.448.603.360,01	477.573.160.468,00	97,57	-4,41
2019	427.877.781.327,59	525.680.130.232,00	122,86	10,07
2020	471.391.719.149,23	447.189.444.514,00	94,87	-14,93
Total	4.574.497.675.086,87	4.383.655.459.199,80	96,52	4,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Selanjutnya untuk melihat persentase realisasi Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal dari realisasi anggaran pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 dapat dilihat pada gambar grafik 1.2 berikut ini.

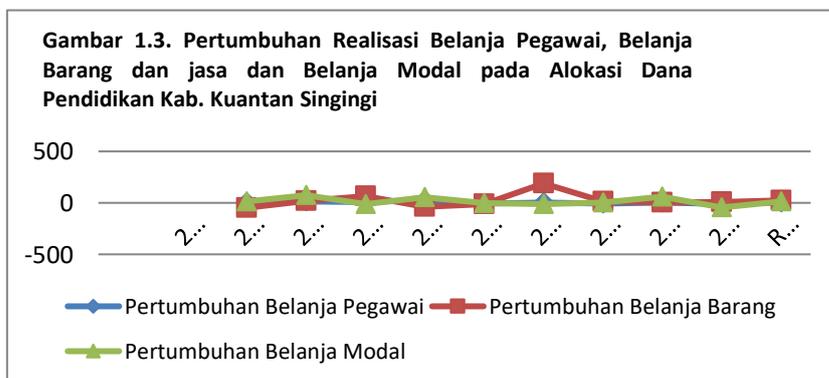


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Dari gambar 1.2 di atas dapat dilihat rata-rata realisasi belanja pegawai dalam 10 tahun dari alokasi dana pendidikan pada APBD tahun 2011-2020 adalah sebesar 95,23%. Untuk rata-rata realisasi belanja barang pada alokasi dana Pendidikan dari tahun 2011-2020 sebesar 103,99%, dan rata-rata realisasi belanja modal pada

alokasi dana Pendidikan tahun 2011-2020 adalah sebesar 102,35%.

Untuk melihat pertumbuhan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada alokasi dana Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 dapat dilihat pada gambar 1.3 grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuantan Singingi 2021

Pada gambar 1.3 grafik di atas dapat dilihat rata-rata pertumbuhan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada alokasi dana Pendidikan pada APBD Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020. Untuk rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2,90%, kemudian rata-rata pertumbuhan belanja barang sebesar 22,70% serta rata-rata pertumbuhan belanja modal sebesar 15,03%.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Salah satu misi pemerintah daerah adalah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki sumber daya saing. Tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Salah satu sasaran dalam tujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas Pendidikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Mutu pendidikan menjadi salah satu unsur fundamental dalam menetapkan kemampuan suatu daerah untuk mengembangkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (Arofah dan Rohimah, 2019). Nilai mutu pembangunan merupakan indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia (*United Nations Development Program (UNDP)*). Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan mengakibatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan individu, sehingga produktivitas yang dihasilkan akan rendah pula dan akan berdampak pada pekerjaannya. Dimensi pengetahuan dalam penghitungan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan terdiri dari 2 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) menghitung pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang (Yogi dkk, 2018). Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya (tahun) pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Pada tabel 7 dapat dilihat untuk harapan lama sekolah

menunjukkan bahwa dari tahun 2011-2020, harapan penduduk usia 7-24 tahun untuk meneruskan pendidikan meningkat menjadi 13,33 pertahun. Hal ini sudah melampaui target pemerintah dalam wajib belajar 12 tahun. Untuk itu pemerintah Kabupaten harus selalu konsisten

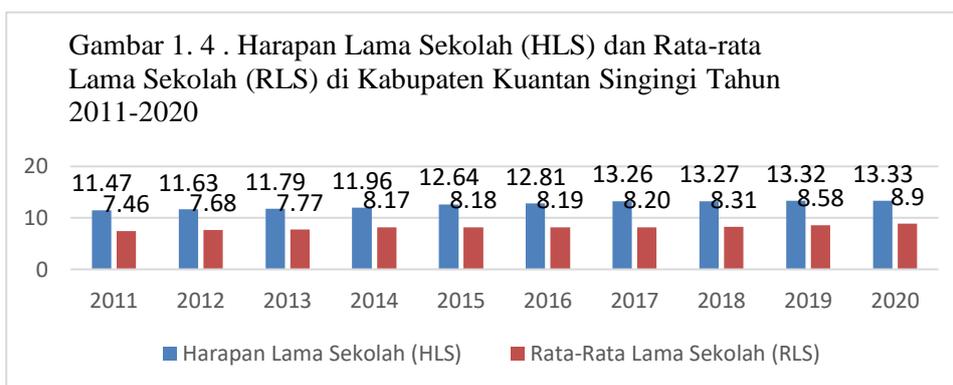
dalam menjalankan program-program bidang pendidikan agar target yang diinginkan tercapai.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk yang telah berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

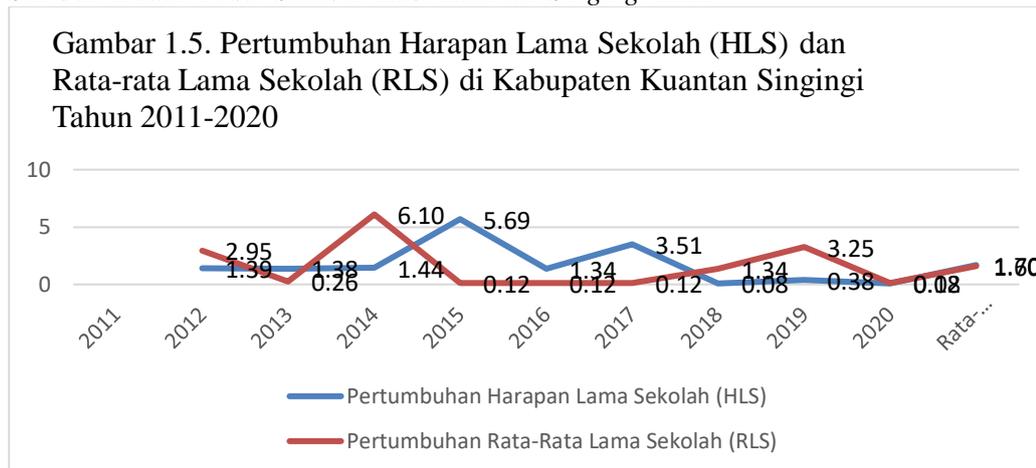
Indikator berikutnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (Badan Pusat Statistik). Kemudian menurut Yogi dkk (2018), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Dalam menghitung Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki batas maksimum 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Selanjutnya menurut Soharto (2021), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani dan menempuh pendidikan formal.

Kemudian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga di artikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk pada usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (Wasista dan Farqih 2020). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat memperlihatkan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Apabila Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Semakin tinggi maka jenjang Pendidikan yang ditempuh atau dijalani juga akan semakin tinggi

Untuk melihat Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta pertumbuhannya di Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1.4 dan gambar lima berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kuantan Singingi 2021

Dari gambar 1.4 dan gambar 1.5 diagram dan grafik di atas dapat dilihat untuk rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 10 tahun terakhir masih berjalan lambat atau hanya sebesar 1,70%. Namun angka Harapan Lama Sekolah dalam 10 tahun terakhir selalu meningkat dari 11,47 pada tahun 2011 menjadi 13,33 pada tahun 2020. Untuk pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,69% dan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah terendah terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020 sebesar 0,08%.

Untuk angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kuantan Singingi juga terus meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2020, namun peningkatan yang terjadi juga relatif lambat. Pada tahun 2011 angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,46 dan sampai tahun 2020 berada pada angka 8,59. Sementara target pemerintah daerah yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 adalah 10,06 (BPS Kuantan Singingi). Kemudian padadapat dilihat untuk rata-rata pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kuantan Singingi 10 tahun terakhir atau dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 1,60%. Rata-rata Pertumbuhan rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,10% dan terendah terjadi pada tahun 2015

sampai dengan tahun 2017 serta tahun 2020 sebesar 0,12%.

Berdasarkan dari semua data tabel di atas dapat kita lihat perbandingan rata-rata pertumbuhan alokasi dana pendidikan yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak sebanding. Walaupun terjadi fluktuasi atau naik turun alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya namun cenderung meningkat akan tetapi pertumbuhan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu meningkat setiap tahunnya cenderung tidak signifikan.

Menurut Bado dan Hasbiah (2017) bahwa belanja pemerintah sektor pendidikan yang diproksi dengan 3 (tiga) variabel yakni Belanja Gaji, Belanja Barang, Jasa dan Modal dan Belanja Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-Rata Lama sekolah (RLS). Dengan porsi belanja sektor pendidikan yang meningkat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja pendidikan yang diproksi dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Menurut Silaban (2017) berdasar hasil penelitian menyatakan bahwa belanja bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan pengaruh dan signifikan terhadap rata-rata melek

huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kemudian menurut Andiny dan Sari (2018) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. khusus untuk IPM dimensi pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan mengambil lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dasar dari penelitian ini memilih lokasi ini karena Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang masih baru sehingga diperlukannya perhatian khusus terhadap mutu pendidikan dengan memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan baik dari APBD maupun dari APBN. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data dan dalam penelitian ini mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kuantan Singingi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Realisasi Anggaran Dana Pendidikan	Rata-Rata Pertumbuhan
2011	324.116.567.083,00	
2012	321.543.263.926,00	-0,79
2013	382.897.445.475,00	19,08
2014	415.453.669.728,00	8,50
2015	516.948.910.065,80	24,43
2016	472.636.245.093,00	-8,57
2017	499.616.622.615,00	5,71
2018	477.573.160.468,00	-4,41
2019	525.680.130.232,00	10,07
2020	447.189.444.514,00	-14,93
Total	4.383.655.459.199,80	4,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021

Dari 95,83% realisasi belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 tersebut terdiri dari realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah belanja pegawai untuk sektor

Hasil Penelitian

Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan Mutu Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan

1. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada sektor pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat satu (1) tentang sistem pendidikan nasional bahwa dana pendidikan selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja Pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 rata-rata 35, 69% atau telah melebihi 20% yang ditetapkan UU nomor 20 tahun 2003.

Dari tabel 5 dapat dilihat pertumbuhan realisasi anggaran belanja pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 sebesar 4,34 persen. Walaupun belanja pendidikan dalam 10 tahun terakhir fluktuatif akan tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya cenderung meningkat. Rata-rata realisasi belanja pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 sebesar 95,83%.

pendidikan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari guru dan non guru. Belanja pegawai digunakan untuk membayarkan gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan guru dan non guru. Adapun realisasi belanja pegawai pada anggaran dana pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Realisasi Belanja Pegawai pada realisasi Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	Rata-rata (%)
2011	324.116.567.083,00	266.792.463.339,00	83,31
2012	321.543.263.926,00	284.833.341.721,91	86,33
2013	382.897.445.475,00	333.441.752.660,00	82,04
2014	415.453.669.728,00	377.771.246.536,24	82,07
2015	516.948.910.065,80	483.921.865.785,00	83,09
2016	472.636.245.093,00	475.569.936.703,00	82,32
2017	499.616.622.615,00	402.031.826.262,98	78,64
2018	477.573.160.468,00	370.958.833.165,01	75,92
2019	525.680.130.232,00	352.183.699.310,59	70,64
2020	447.189.444.514,00	339.904.794.540,23	74,23
Total	4.383.655.459.199,80	3.687.409.760.023,96	79,86

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2011-2020

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat rata-rata realisasi anggaran belanja pegawai dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 sebesar 79,86 % dari total realisasi belanja pendidikan. Artinya hampir 80% belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi hanya digunakan untuk belanja pegawai saja. Realisasi paling tinggi belanja pegawai terjadi pada tahun 2012 sebesar 86,33%, sedangkan realisasi terendah belanja pegawai terjadi pada tahun 2019 sebesar 70,64%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa untuk sektor pendidikan digunakan untuk menunjang aktifitas pendidikan baik untuk administrasi kantor maupun untuk proses belajar mengajar disekolah. Adapun realisasi belanja barang dan jasa pada anggaran belanja pendidikan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada realisasi Belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan	Realisasi Anggaran Belanja Barang	Rata-Rata (%)
2011	324.116.567.083,00	28.171.882.025,00	8,69
2012	321.543.263.926,00	14.746.359.069,00	4,59
2013	382.897.445.475,00	17.874.618.775,00	4,67
2014	415.453.669.728,00	29.618.076.072,00	7,13
2015	516.948.910.065,80	18.670.784.847,80	3,61
2016	472.636.245.093,00	16.048.518.288,00	3,40
2017	499.616.622.615,00	46.344.239.682,00	9,28
2018	477.573.160.468,00	52.987.979.444,00	11,10
2019	525.680.130.232,00	54.286.977.790,00	10,33
2020	447.189.444.514,00	59.988.910.942,00	13,41
Total	4.383.655.459.199,80	338.738.346.934,80	7,62

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat rata-rata realisasi belanja barang dan jasa dari realisasi anggaran belanja pendidikan dalam 10 tahun dari tahun 2011-2020 adalah sebesar 7,62%. Artinya proporsi untuk belanja barang dan jasa dari anggaran belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi dalam 10 tahun dari tahun 2011-2020 rata-rata hanya sekitar 7,62% dari

total realisasi belanja pendidikan. Realisasi belanja barang dan jasa tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 13,41%, sedangkan realisasi belanja barang dan jasa terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,40%.

c. Belanja Modal

Adapun realisasi belanja modal pada realisasi anggaran belanja pendidikan dari tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Realisasi Belanja Modal pada realisasi belanja Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011- 2020

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan	Realisasi Anggaran Belanja Modal	Rata-Rata (%)
2011	324.116.567.083,00	25.920.997.967,00	8,00
2012	321.543.263.926,00	29.198.474.809,00	9,08
2013	382.897.445.475,00	50.912.785.800,00	13,30
2014	415.453.669.728,00	44.867.047.444,00	10,80
2015	516.948.910.065,80	68.738.707.566,00	13,30
2016	472.636.245.093,00	67.536.897.130,00	14,29
2017	499.616.622.615,00	60.360.786.505,00	12,08
2018	477.573.160.468,00	62.032.979.356,00	12,99
2019	525.680.130.232,00	100.042.326.842,00	19,03
2020	447.189.444.514,00	55.255.676.455,00	12,36
Total	4.383.655.459.199,80	564.866.679.874,00	12,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi 2021

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat rata-rata realisasi belanja modal dari realisasi anggaran belanja pendidikan dalam 10 tahun dari tahun 2011-2020 sebesar 12,52%. Artinya proporsi realisasi untuk belanja modal dari realisasi anggaran belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 rata-rata hanya sekitar 12,52% jauh lebih rendah dibandingkan dengan proporsi belanja pegawai namun lebih besar dari belanja barang dan jasa.

Pembahasan

Analisis Dampak Pengalokasian Anggaran Belanja Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan

1. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan Terhadap Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs dan SD/MI

Alokasi anggaran belanja pendidikan memberikan dampak terhadap hasil nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil dapat dilihat ketika anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 terjadi fluktuasi tetapi cenderung meningkat, akan tetapi nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi juga terjadi fluktuasi tetapi cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhannya yang -0,22 dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian alokasi anggaran belanja pendidikan juga memberikan dampak terhadap hasil nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SD/SMP di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil data

penelitian dapat dilihat ketika anggaran pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2011-2020 terjadi fluktuasi cenderung meningkat, sedangkan nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi juga terjadi fluktuasi cenderung menurun pula dengan pertumbuhan -0,72% dalam 10 tahun terakhir.

Terjadinya fluktuasi Nilai Ujian (UN) baik SD/MI maupun tingkat SMP/MTs disebabkan oleh masih adanya pemanfaatan anggaran belanja pendidikan yang tidak tepat sasaran.

2. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Guru Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikat

Anggaran belanja pendidikan juga memberi dampak terhadap mutu guru yang nantinya akan berdampak terhadap mutu siswa dalam meningkatkan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil data penelitian untuk guru tingkat SD/MI persentase guru yang berkualifikasi S1/D-4 lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 terus meningkat dari 76,90% pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 87,99% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,43%, sedangkan persentase guru tingkat SD/MI yang bersertifikat terjadi fluktuasi namun cenderung menurun selama lima tahun terakhir dari 49,50% pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 turun menjadi 48,31% dengan rata-rata pertumbuhan -3,32%. Persentase jumlah guru SD/MI yang berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi telah di atas 70% dan separuhnya telah bersertifikat sehingga telah memenuhi standar minimal

berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013.

Begitu juga untuk guru tingkat SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-4 dan bersertifikat juga telah memenuhi standar minimal 70% berdasarkan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013. Persentase guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-4 bersertifikat terjadi fluktuasi namun cenderung menurun dilihat dari rata-rata pertumbuhan sebesar -1,60% di mana tahun 2016 guru yang berkualifikasi S1/D-4 sebesar 82,70% terjadi fluktuasi hingga pada tahun 2020 turun menjadi 77,52%. Kemudian persentase guru tingkat SMP/MTs yang bersertifikat turun sampai 32,37% pada tahun 2020 di mana pada tahun 2016 masih sebesar 54,64%. Hal ini disebabkan banyaknya guru yang telah pensiun namun terjadi moratorium penerimaan CPNS yang menyebabkan tidak adanya pengganti guru yang telah pensiun.

3. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi cenderung menurun sama halnya dengan anggaran belanja pendidikan yang juga cenderung menurun. Nilai APK tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 109,95% dan pada tahun 2020 turun menjadi 102,79% dengan rata-rata pertumbuhan -1,67%. Begitu juga dengan APK tingkat SMP/MTs cenderung menurun di mana tahun 2016 sebesar 95,51% dan pada tahun 2020 nilai APK menjadi 89,06% dengan rata-rata pertumbuhan -1,73%.

Jadi Anggaran belanja pendidikan memberikan dampak terhadap Angka Partisipasi Kasar. Ketika anggaran belanja pendidikan menurun dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami penurunan baik untuk tingkat SD/MI maupun untuk tingkat SMP/MTs.

Berdasarkan hasil penelitian hasil peningkatan nilai APK tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap aktifitas bersekolah tingkat dasar yang meningkat, namun demikian dari aspek manajemen Pendidikan masih menghadapi masalah kurangnya sosialisasi terhadap orang tua murid untuk meningkatkan kesadaran penduduk untuk berpartisipasi memasukkan anaknya ke jenjang Pendidikan SD/MI sesuai umur sekolah SD/MI. Disisi lain masih tingginya APK juga disebabkan oleh belum akuratnya data kependudukan sehingga berpengaruh pada belum optimalnya manajemen Pendidikan terutama untuk jenjang Pendidikan SD/MI.

Dari hasil juga menunjukkan bahwa

adanya penurunan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah tingkat menengah pertama SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun data tersebut juga dapat mengindikasikan bahwa rendahnya APK dari jenjang Pendidikan SMP/MTs dapat disebabkan oleh adanya lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah di wilayah tersebut atau juga karena putus sekolah.

4. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Murni (APM)

Anggaran belanja pendidikan memberikan dampak terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat dari hasil data penelitian, untuk Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi cenderung menurun di mana pada tahun 2016 sebesar 98,72% hingga tahun 2020 turun menjadi 96,4% dengan rata-rata pertumbuhan -0,59%. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs juga terjadi fluktuasi cenderung menurun pula di mana pada tahun 2016 sebesar 86,71%. Hingga tahun 2020 menjadi sebesar 72,41% dengan rata-rata pertumbuhan -4,41%.

Terjadinya penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/MTs disebabkan karena terdapat siswa yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs tetapi tidak sesuai dengan kelompok usia berdasarkan jenjang pendidikan tersebut dan juga masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD/MI.

5. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dari data hasil data penelitian lima tahun terakhir tahun 2016-2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik tingkat SD/MI maupun Tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi fluktuasi namun cenderung menurun. APS untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 98,72% kemudian fluktuatif hingga tahun 2020 menjadi 96,4% dengan rata-rata pertumbuhan -0,74%. APM untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 86,71% kemudian fluktuatif hingga tahun 2020 sebesar 72,41% dengan rata-rata pertumbuhan -3,22%. Ini sama halnya dengan anggaran belanja pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga fluktuatif cenderung menurun dalam lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020. Jadi belanja pendidikan memberikan dampak terhadap APS di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Makin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah

di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum

6. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Angka Putus Sekolah (APTS)

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan untuk APTS tingkat SD/MI sebesar -36,75 dan tingkat APTS SMP/MTs sebesar -13,49. Hal ini menunjukan kinerja pemerintah daerah sudah berhasil dalam menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS) untuk tingkat SD/MI maupun untuk tingkat SMP/MTs di Kabupaten Kuantan Singingi. Walaupun anggaran belanja Pendidikan cenderung menurun akan tetapi APTS bisa ditekan oleh pemerintah, hal ini juga menunjukan penggunaan anggaran belanja Pendidikan sudah tepat sasaran dalam menekan Angka Putus Sekolah (APTS) di Kabupaten Kuantan Singingi.

7. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Angka Kelulusan (AK)

Untuk angka kelulusan untuk tingkat SD/MI maupun SMP/MTs dalam 5 tahun terakhir rata-rata sudah mencapai 100%. Walaupun anggaran belanja Pendidikan dalam 5 tahun terakhir fluktuatif cenderung menurun akan tetapi Angka Kelulusan baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs bisa mencapai 100%. Angka kelulusan sangat dipengaruhi oleh mutu pembelajaran yang baik, sarana dan prasarana sekolah, maupun social ekonomi yang meliputi Pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua dan pendapatan orang tua.

8. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS)

Anggaran belanja pendidikan juga memberi dampak terhadap angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Ketika anggaran belanja pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 fluktuatif cenderung meningkat angka Harapan Lama Sekolah (HLS) juga selalu meningkat bahkan setiap tahun dengan pertumbuhan 1,70%. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2011 sebesar 11,47% terus meningkat sampai tahun 2020 sebesar 13,33%. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS).

9. Dampak Anggaran Belanja Pendidikan terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS)

Anggaran belanja pendidikan juga memberi dampak terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Ketika anggaran belanja pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 fluktuatif cenderung meningkat angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) juga selalu meningkat bahkan setiap tahun dengan pertumbuhan 1,60%. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2011 sebesar 7,46% terus meningkat sampai tahun 2020 sebesar 8,59%. Untuk itu perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pertumbuhan Mutu Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan

Anggaran belanja pendidikan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan manusia sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi dalam penelitian ketika secara simultan atau bersama-sama belanja pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Namun pertumbuhan pembangunan manusia sektor pendidikan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah hanya 1,65% dalam 10 tahun dari 2011-2020.

Ketika dilihat secara parsial di mana belanja pendidikan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, dari hasil regresi yang berpengaruh signifikan hanya belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja pegawai dan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan.

Dilihat dari proporsi ketiga belanja tersebut pada realisasi anggaran belanja pendidikan dapat dilihat bahwa belanja barang dan jasa hanya sekitar 7,62% atau yang paling kecil dibandingkan belanja pegawai sebesar 79,86% dan belanja modal 12,52%. Walaupun sebagian besar belanja pendidikan habis untuk belanja pegawai dan juga belanja modal akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan.

Oleh sebab itu faktor yang menyebabkan masih rendahnya pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan disebabkan karena alokasi anggaran belanja pendidikan yang belum proporsional. Masih kecilnya proporsi belanja barang dan jasa dibandingkan belanja pegawai dan belanja modal pada anggaran belanja pendidikan, sedangkan dari hasil penelitian yang memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan hanya

belanja barang dan jasa.

4. KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan maka bisa disimpulkan yaitu:

- a. Berdasarkan hasil regresi linier berganda, secara simultan belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Alokasi dana untuk pendidikan berdampak terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan di mana setiap dana untuk pendidikan di naikkan akan berdampak naiknya mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Walaupun secara keseluruhan belanja untuk sektor pendidikan memberikan dampak terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan namun secara item pembagian yang memberikan dampak terhadap mutu pembangunan manusia sektor pendidikan hanya belanja barang dan jasa saja.
- b. Anggaran belanja pendidikan memberi pengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan manusia sektor pendidikan. Namun pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2011-2020 masih sangat rendah sebesar 1,65%. Masih rendahnya pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan disebabkan karena faktor pembangian belanja pendidikan yang belum proporsional antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran belanja pendidikan sebagian besar dihabiskan untuk belanja pegawai (79,86%) dan belanja modal (12,52%), akan tetapi kedua belanja tersebut tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan. Sedang belanja barang dan jasa mendapatkan proporsi terkecil hanya sebesar (7,62%) akan tetapi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan mutu pembangunan manusia sektor pendidikan.

5. REFERENSI

- Arifa, Fieka Nurul dan Prayitno, Ujianto Singgih. 2019. *Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta
- Arofah, Irvana dan Rohimah, Siti. 2019. *Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui*

Pengeluaran Rill Per Kapita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Sainatika Unpam. Pamulang

- Andiny, Puti dan Sari, Merlindiana Gus Puja. 2018. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sekotr Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan di Kota Langsa*. Fakultas Ekonomi Universitas Samudera.
- Arbangi dkk. 2016. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Kencana. Jakarta
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: ERLANGGA
- Artaningtyas dkk. 2011. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah*. Buletin Ekonomi Badan Pusat Statistik . 2020. *Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Kabupaten Kuantan Singingi 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. Teluk Kuantan
- Bado, Basri dan Hasbiah, Sitti. 2017. *Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makasar. Makasar
- Becker, G. S. and Chiswick, B. R. 1966. *Education and the distribution of earnings*. *American Economic Review* 56 (2): 358–369.
- Duma, Enike T.Y. 2020. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang*. Ekopem Universitas Timor.
- Dewi, Fitriani Kusuma. 2016. *Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah (2012-2016)*. STIE YKPN
- Elfindri, Hendro Ekwarso dan Zamzami. 2019. *Ekonomi pembangunan Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok
- Fahmi. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Tahun 2011-2015*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Frank, R. H., & Bernanke, B. S. (2007). *Principles of Microeconomics (3rd ed.)*. New York: McGraw-Hill/Irwin.

- Ghozali, H. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemah Sumarno Zein. Jakarta: Erlangga
- Habeahan. (2015). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara) Periode 2004-2013*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Hutabarat, Pardamean. 2013. *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. Kemendagri. Jakarta
- Khusaini, Mohd. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang. UB Press.
- Keskin, Abdullah. 2011. *Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü Ve Türkiye*. Atatürk üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi. Cilt: 25. SayAD, 3-4
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 2021. *Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021*. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta
- <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/1022>. Di Akses pada tanggal 10 Pebruari 2020
- Laisina, C., et al. 2015. *Pengaruh Pegeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15. No.4 ISSN : 2302-2663
- Muliza, Zulham dan Seftarita. 2017. *Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh*. FEB Unsyiah. Banda Aceh
- Menteri Keuangan Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi Anggaran*. Jakarta
- Nadrizoh dkk. 2018. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar di Indonesia*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2019, No. 6322. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016*. Teluk Kuantan
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 2019. *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*. Teluk Kuantan
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*. Teluk Kuantan
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*. Teluk Kuantan
- Priyono. 2021. *Analisis Regresi dan Korelasi Untuk Penelitian Survei (Panduan Praktis Olah Data dan Interpretasi : Dilengkapi Cara Perhitungan Secara Manual)*. Guepedia. Indonesia
- Purwananti, Y. Sedyo. 2016. *Peningkatan Kualitas Pendidikan Sebagai Pencetak Sumber Daya Manusia Handal*. STKIP PGRI.Tulung Agung.
- Silaban, Lasta M. 2017. *Pengaruh Alokasi Belanja Pendidikan Terhadap Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sorolngun Periode 2006-2015*. Universitas Jambi. Jambi
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sarnoto, A. Zain dan Nugroho, Taufik. 2015. *Dimensi Mutu Dalam Pendidikan Sekolah*. Institut PTIQ. Jakarta
- Sasana, Hadi. 2012. *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Media Ekonomi Dan Manajemen, 25(1).
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Yogyakarta
- Sanusi, Achmad. (1994). *Strategi Operasional Peningkatan Mutu Wajar 9 Tahun dan Pendidikan Luar Sekolah di Desa Tertinggal*. Bandung: IKIP Bandung.
- Todaro, Michael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Wasista, dan Farqi, Reyhan. 2020. *Analisis Pengaruh Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Pada Sektor Formal Di Indonesia*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Malang
- Zebua, Willman Fogati. 2014. *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya